

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul karim
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Ma'is. 2019. *Prosedur Pengajuan KPR Subsidi di PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang.
- Basrowi dan suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr. Syahriyah Semaun, S.E, M.M, 2019. *Analisis Management Pemberian Kredit Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk*. IAIN Parepare.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: ALFABETA.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Isra Murni. 2015. *Aplikasi Prinsip 5C dalam Realisasi Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Cab. Panam Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam: Riau.
- Kasmir dan Jakfar. 2007. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Ajeng, 2017. *"Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam"* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare).

Mulyana, Deddy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN

Prabandari, Arum. 2015. "Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman", Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," dalam Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: ALFABETA, cv, 2014), h. 21.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Subagio, Ahmad. 2007. *Study Kelayakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia.

Tim penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Parepare: STAIN Parepare.

Taufik Rahman. 2019. *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi pada Bank BTN Syariah KCP Panam Pekanbaru* Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam.

Internet

BTN Syariah, "Profil BTN Syariah". *Situs Resmi BTN Syariah*. <http://www.btn.co.id/> (01 September 2019).

http://eprints.walisongo.ac.id/739/3/082411084_Bab2.pdf (01 September 2019).
Politeknikpajajaran.ac.id (diakses pada 12 September 2019)

Wikipedia, "Kredit Pemilikan Rumah". https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah (01 September 2019).



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Kapan pembiayaan KPR Subsidi di luncurkan? apakah sejak berdirinya bank BTN Syariah?
2. Berapa jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan KPR Subsidi sejak 2 tahun terakhir?
3. Apa tujuan pembiayaan KPR Subsidi dilakukan?
4. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan KPR Subsidi di BTN Syariah?
5. Apa manfaat yang diperoleh nasabah dan bank setelah melakukan transaksi pembiayaan KPR di BTN Syariah?
6. Factor apa saja yang mendukung keberhasilan dari program pembiayaan KPR Subsidi?
7. Dalam menentukan jangka waktu pembiayaan, seperti apa strategi yang dilakukan dalam menentukan jangka waktu pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah?
8. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari transaksi pembiayaan KPR Subsidi?
9. Berapakah biaya administrasi atas transaksi pembiayaan KPR Subsidi?
10. Seperti apa standar operasional prosedur bank BTN Syariah dalam menentukan kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan KPR Subsidi?
11. Seperti apakah nasabah yang layak diberikan pembiayaan KPR Subsidi?
12. Sebelum akad tentunya dilakukan analisis pembiayaan, dalam analisis pembiayaan itu sendiri bentuknya seperti apa?
13. Pada saat proses akad dilakukan, seperti apa kebijakan-kebijakan bank BTN Syariah dalam memberikan pembiayaan KPR Subsidi atukah tidak ada kebijakan yang diberikan?

HASIL WAWANCARA

1. Kapan pembiayaan KPR subsidi di luncurkna?apakah sejak berdirinya Bank BTN?

:

Jumlah nasabah pembiayaan KPR diatur oleh pemerintah. Contoh bank BRI sekian, Bank BTN sekian, dan seterusnya. Namun, Mayoritas pembiayaan KPR berada pada bank BTN. SSM (subsidi selisih margin) di syariah. Pada bank konvensional istilahnya subsidi selisih bunga. Kalau di syariah ada dua skin dalam angsuran nya. Yang pertama kebijakan bank mengikuti margin dari pemerintah untuk subsidi sebanyak 5% namun saat memasuki tahun ke-11, marginnya akan mengikut Pada bank terkait sementara bank BTN sendiri memberikan kebijakan tersebut sebesar 12,75%.

Yang pertama, pemerintah mencover subsidi hanya selama 10 tahun berbeda pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 20 tahun yang disebut SSM. Sehingga kuotanya lebih banyak contoh kuota yang kemarin 100% untuk 50 orang sekarang berubah 100% untuk 100 orang tapi hanya dalam 10 tahun saja.

Saat berdirinya bank BTN bantuan subsidi disebut BPDPP dan SMF yang bertanggung jawab dibawah kementerian keuangan jadi ada kerjasama antara Bank BTN Syariah dan BPDPP dan SMF. Atau dalam artian BPDPP itu adalah KPR pengurangan kuota misalnya BTN dapat berapa bank syariah dapat berapa. Dan kemarin bank BTN baru saja ditunjuk sebagai Bank dengan kuota terbanyak yang dikasi pemerintah yaitu 146 ribu unit.

2. Berapa jumlah nasabah yang melakukan transaksi permbiayaan KPR subsidi sejak 2 tahun terakhir?

: 2.745

3. Apa tujuan pembiayaan KPR dilakukan?

:

Kita megikuti program pemerintah yaitu satu juta rumah artinya apa? Termasuk disulawesi sendiri diparepare itu kemarin Bank BTN sayriah parepare thun lalu nomor 1 secara nasional penyaluran KPR subsidi. Berarti dalam artian tujuannya sudah tercapai.

4. Bagaimana prosedur pemberiaan pembiayaan KPR subsidi di bank BTN Syariah?

:

Yang pertama, kelengkapan berkas. Contoh, harus meninjau rumah dan apakah permintaan rumah yang diinginkan sudah bekerjasama dengan bank BTN Syariah atau belum.

Jadi yang pertama, developer harus dipastikan bekerja sama dengan BTN Syariah agar saat mengambil rumah. Contoh, Grand Sulawesi apakah menggunakan system PKS atau bekerjasama dengan bank Syariah. Jika bekerjasama berarti bias calon nasabahnya memasukkan berkas ke BTN syariah.

Kelengkapan berkasnya, yang pertama, yaitu biodata. Contoh KTP, NPWP, Kartu keluarga, keterangan status menikah atau belum, jumlah penghasilan, surat keterangan usaha kalau ada usaha, kalau dia sudah bekerja SKnya, rekapitulasi gaji 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir rekening koranya (contoh gajinya di transfer berarti harus ada keterangan rekening koran, contoh bank mandiri. Itu harus ada. (jika dia memiliki wirausaha harus ada keterangan laporan keuangan 6 bulan terakhir) namun tetap bertahap, misalnya rekening korannya masuk pasti wawancara dahulu terkait keterangan info Dimana mendapatkan info tentang perumahan itu dia berada di blok berapa, serta motivasinya untuk membeli rumah di perumahan itu apa. Apakah dekat dengan tempat ia bekerja, harus memiliki rumah dekat dengan tempat kerja, akses perumahan bagus atau strategis contoh dekat dengan sekolah, rumah sakit dll. Kemudian, ditanyai terkait biaya hidupnya berapa, berapa jangka waktu yang dia inginkan untuk pembiayaan KPR.

5. Apa manfaat yang diperoleh nasabah dan Bank setelah melakukan Transaksi pembiayaan KPR di BTN syariah?

:

Yang pertama yaitu keuntungannya pada manfaat, hampir semua bank syariah, khusus bank syariah jika terkait KPR kuota yang paling banyak adalah BTN syariah. Jika pada bank BTN syariah kuotanya paling banyak, kerjasama dengan KPS dengan perumahan atau developer paling banyak dibanding Bank syariah yang lain. Karna Bank BTN Syariah adalah Pembiayaan KPR. Contoh di bank syariah lain hanya mencakup beberapa perumahan namun BTN Syariah sudah mencakup di daerah majene ada, polman, sidrap, parepare, bone bias jadi di sinjai ada. Di daerah palu sampai di toli toli. Intinya BTN Syariah Cakupannya lebih besar beda dengan BNI Syariah cuman sekitaran disini kalau di parepare hanya disitu. Berbeda dengan BTN syariah.

Terus jika keuntungan disyariah, bagi Nasabah yang agamais sedikit mereka lebih senang yang syariah. Satu karna jelas (tadi saya lupa menjelaskan bahwa saat ini SSM skema sekarang memakai akad mutanakisoh (akad kerjasama yang mengatur pembagian antara nasabah dan bank. Platform yg disetujui akan diisi oleh bank sementara porsi nasabah pada saat di awal yaitu berupa DP. Bagaimana dengan kepemilikan 100% maka nasabah harus mengangsur setiap bulannya. .

Nah kepastian tersebut ada diakad nahwa porsi bank berapa dan nasabah berapa, jangka waktu berapa. Nah ini keuntungan yang diperoleh bank selama 15 tahun, keuntuangan yg diperoleh bank selama 20 tahun, 10 tahun nasabah mau pelunasan, misalnya maka akan diberikan juga bulan ini bgini , sisa pokoknya nasabah begini jadi setiap bulan itu ada.

Ada namanya jadwal angsuran nasabah dimana nasabah bias menghitung sendiri bahwa dimana/ kapan/ dibulan berapa angsuran dapat diselesaikan. Misalnya pelunasan dibulan ke 50, Berapa dana ynag harus disiapkan, bagaimana prosedur pelunasannya.

Di bank syariah sendiri ada istilah diskon, misalnya dia pelunasan bisa diajukan untuk minta diskon. Jadi setiap pembayaran perbulan nasabah mngetahui berapa sisa pokok yang mesti mereka lunasi, berpa margin di bank.

6. Factor apa saja yang mendukung keberhasilan dari program pembiayaan KPR Subsidi?

:

1. Factor kemitraan

Hubungan antara kemitraan dan developer. Diparepare sendiri developer ada yang namanya versi..... misalnya di polman atau parepare sendiri ada kerukunan ... Indonesia saling komunikasi dengan bekerjasama dengan UKM Syariah. Hampr seriap himpunan atau pengembang itu berperan penting. Misalnya mereka punya project dan bekerjasama dengan BTN Syariah atau mereka punya unit tersedia. Misalnya kuota tersedia tapi rumahnya belum jadi kan susah juga. Jadi kita perlu bekerjasama dengan developer seperti itu juga. Karna rumah harus jadi terlebih dahulu sebelum dianggarkan jadi nasabah tidak komplek lagi terkait masalah listrik, air, semua sudah harus fix atau selesai.

7. Dalam menentukan jangka waktu pembiayaan, seperti apa strategi yang dilakukan dalam menentukan jangka waktu pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah?

:

Sebenarnya ini adalah pekerjaan analis untuk dianalisa jadi ada namanya revisi. Recommand of capacity. Kita lihat bahwa revisi itu. THP nya berapa atau bersihnya perbulan contoh gaji bersih nasabah 5 juta setelah dikurangi hutang. Kemudian dikalikan dengan fix income 60% contoh 5 juta x 60%= 3 juta. 3 juta inilah kemampuan dia membayar dikalikan 60 persen, 40% untuk biaya hidupnya dan tidak perlu di kurangi lagi biaya hidup. Pihak bank berasumsi bahwa THP 40% tersebut untuk biaya hidup 60% kemampuan untuk membayar. Contoh 10 tahun angsurannya adalah 1.5 juta, tapi karna kemampuannya 3 juta sudah

barang tentu dia lolos. Contoh lain jika kemampuan hanya 2 juta kemudian angsuran 1.5 juta dari bank akan tetap ditolak (tolak platform) atau jangka waktunya akan ditambah menjadi 20 tahun supaya sesuai dengan recommend of capacity nya.

8. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari transaksi pembiayaan KPR Subsidi?

:

Terkait margin keuntungan nya bank berapa. Biasanya jika harga umum 105 juta atau 136 juta keuntungan yang diperoleh bank itu berapa. Keuntungan diukur berdasarkan jangka waktu contoh harga rumah 136selama 5 tahun dan 10 tahun 185 juta (bbrti ada keuntunga sekitar 50 juta) tapi hasil 50 juta tersebut tidak langsung masuk ke bank tetapi ada persetujuan di awal bahwa nasabah harus rajin mengangsur untuk keuntungan secara maksimal karna 15 tahun bank tidak untung sebesar 50 juta jika nasabah tak membyar atau mandek.

Keuntungan kedua, efisiensi margin dari nasabah. Biasanya da penulunan di pertengahan tahun atau ditahun kelima ... atau belum balik kodal atau keuntungan belum maksimal. Biasanya hampir seluruh bank menginginkan untung yang maksimal. Jika belum memasuki pada tahun kelima 5 akan bermasala karna pasti pengeluaran lebih banyak dibandingkan pengembalian. Pelunasan tetap bisa dipercepat tetapi harus persetujuan selanjutnya.

9. Berapakah biaya administrasi atas transaksi pembiayaan KPR Subsidi?

:

Biaya administrasi sangatlah murah. Untuk yang subsidi sendiri tidak sampai 1 jutaan hanya 900 an kemudian ada asuransi kebakaran dan asuransi jiwa ditanggung oleh pemerintah. Tidak perlu bayar setiap bulan tidak perlu bayar diawal hanya 900 ribu.

10. Seperti apa standar operasional prosedur bank BTN Syariah dalam menentukan kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan KPR Subsidi?

:

Ada di proposal terkait revisi,character (by checking: saat ini diberikan pembiayaan contoh apakah calon nasabah yang bersangkutan pernah bermasalah di Bank sebelumnya atau tidak). Jika calon nasabah punya usaha maka ada yang dikatakan kelangsungan usaha bahwa usaha tersebut seperti apa. Apalagi di saat corona sekarang ini kita mesti lebih selektif menerima nasabah apakah usahanya terganggu atau macet. Apalagi kerja dihotel, sekarang hotel banyak yang tutup nah itu lebih selektif dilihat. Terkait kelangsungan huni, revisi membayar.

11. Seperti apakah nasabah yang layak diberikan pembiayaan KPR Subsidi?

;

5 C: Collateral: transaksi keuangan di bank seperti apa.

Capital : modalnya besar, misalnya dia punya kemauan tinggi tapi modal sedikit itu, nah hal tersebut yang harus diperhatikan. Berapa yang harus dilihat ada yang ada kemampuannya kecil tapi kemauannya besar. Ada juga yang kemauannya kecil tapi kemampuannya tinggi. Nah, mending yang pertama kemampuan sedikit tapi kemauan tinggi. Karna biasanya PNS pun ada yang menunggak. Jadi kembali lagi ke character bahwa kemampuan itu bukan satusatunya tolak ukur. Contohnya orang yang korupsi adalah orang yang kaya juga. Meskipun kita tahu mereka punya contohnya uang 10 juta di rekening tetapi kembali lagi kepada karakter seseorang yang mau bayar, sering menunda minggu kemminggu bulan ke bulan. KPR subsidi tidak memberikan denda kepada nasabah jika terlambat membayar. Jika non subsidi ada denda sesuai kebijakan di Bank.

Pada saat nasabah melakukan penundaan pembayaran maka pihak bank akan melakukan calling kepada yang bersangkutan. Namun jika tetap dilakukan, maka pihak bank akan mendatangi nasabah yang terkait di kediaman (persuasive) setelah itu memberikan SP1 kepada nasabah tersebut, namun jika belum diindahkan maka pihak bank akan mengeksekusi rumah. Contoh kos ditempat orang terus tidak dibayar pasti diusir, sama halnya dengan tidak membayar tagihan selama setahun. Bentuk eksekusi dapat berupa peledangan rumah atau peralihan kepada penghuni lain/recover (urusan nasabah)

Jaminan apakah sesuai dengan permintaan modal? Contoh sertifikat tanah seharga 100 juta maka harga tersebut harus dipressure dan disesuaikan dengan permintaan nasabah disesuaikan dengan setiap penambahan maupun permintaan dari nasabah.

Intinya nasabah yang layak diberikan Peminjangan KPR subsidi adalah mereka yang memenuhi 5 syarat yaitu 5C

Namun sekarang sudah ada aplikasi SiKasep (aplikasi system informasi KPR subsidi perumahan) dimana ia harus sampai pada tahap 3 yang pertama mengisi bodata kemudian kedua akumulasi penghasilah dan selanjutnya perumahan dan yang ketiga dia harus lolos uji subsidi bahwa calon nasabah yang bersangkutan tidak pernah mengambil perumahan subsidi sebelumnya setelah lolos akan dites verify bank yaitu uji NIK jadi harus sinkron dengan data yang diberikasan Casin, SiKasep dan juga bank atau keluar dari Sini jika ada salah satunya tak lolos berarti calon nasabah tidak bisa diterima (dri tahun 2019) kewajiban uji NIK dan SiKasep adalah salah sat media dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin punya rumah agar benar-benar divalidasi sebab ditakutkan

jika calon nasabah adalah pejabat golongan IV tetapi tetap menginginkan pengusulan Rumah bersubsidi.

12. Sebelum akad tentunya dilakukan analisis pembiayaan, dalam analisis pembiayaan itu sendiri bentuknya seperti apa?

:

Elektronik pembiayaan yaitu pengimputan berkas lalu Dikumpulkan berkas disitu dan dikirimkan k makassar karna analis ada disana. Contoh saat bank BTN cabang parepare melakukan bank checking di OJK jika yang bersangkutan ada tertanda black list vol5, vol 4, vol 3. Mending tak diikutkan karna sudah pasti ditolak.

Setelah data diimput analislah yang mengelola datanya misalnya dia rekomendasi berpa platform, pembayaran, angsuran, kemudian dimintai untuk mengisi berkas yang masih dibutuhkan kemudian sebelum akad harus ada dokumentasi semua baru putusan dari bos.

Contoh rekomendasi Analis; 1.5 juta revisi namun angsuran 1.6 juta, dalam perspective pimpinan bahwa jika hanya selisih 100 ribu maka itu wajar karna setiap tahun ada yang namanya kenaikan UMP. Berarti pimpinan berpatokan bahwa dia bisa 1.6 walaupun analis merekomendasikan 1.5 jadi kesimpulannya pimpinan yang terkait yang memutuskan. Jadi yang direkomendasikan analis adalah 1.5 dalam 11 bulan sedangkan yang diputuskan oleh pimpinan adalah 1.6 dalam jangka 10 tahun dengan patokan bahwa setiap bulan mengalami kenaikan, bahwa gaji nasabah mengalami kenaikan setiap tahunnya atau mungkin setiap tahun nya dia

13. Pada saat proses akad dilakukan, seperti apa kebijakan-kebijakan bank BTN Syariah dalam memberikan pembiayaan KPR Subsidi ataukah tidak ada kebijakan yang diberikan?

:

Biasanya kalau subsidi kebijakan yang diberikan bank itu tidak ada. Harus sesuai dengan peraturan PUPR. Namun berbeda dengan non- subsidi ada kebijakan yang diberikan oleh Bank. Marginnya Promo, atau misalnya marginnya 12% itu tahun pertama, tahun kedua kami sampaikan. Nasabah atas nama Indra agus adalah margin normal tapi turun jadi angsurannya sebetulnya 1.5 turun 1.2 juta selama 2 tahun tapi ini adalah kebijakan untuk nasabah non-subsidi. Dikarnakan margin untuk developer subsidi semua nya sama karna diatur oleh Menteri PUPR yang harus rumah selesai 100% listrik haru selesai IMB, sertifikat semua tersedia dan terjamin. Intinya semua aturan dan ketentuan ditentukan oleh pusat dan bukan kebijakan bank. Luas bangunan harus diatas 60

maximal 200 luas tanah. Jika semua ya sudah clear atau selesai barulah terjadi akad atau diakadkan. Setelah diakadkan baru proses pencairan. Hal tersebut dilakukan agar tak ada masalah pada saat setelah akad sehingga memungkinkan nasabah menuntut Bank atas ketidak tuntas bangunan. Peraturan PUPR dijelaskan bahwa bank harus menyelesaikan seluruh component dari bangunan misalnya kondisi rumah berapa persen barulah bisa diakadkan jadi itu sudah menjadi putusan bahwa rumah jadi 100%. Misalnya seorang calon nasabah meninjau Rumah yang diinginkan hanya saja pembangunannya baru berjalan 80% maka dia harus menunggu sampai bangunan rumah selesai 100% barulah terjadi akad.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 9 Soreang, Kota Parepare 91192 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 926 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 682/In.39.8/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : INDRA AGUS
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 14 OKTOBER 1996
NIM : 15.2300.165
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DESA WANIO, KECAMATAN PANCA LAUTANG,
KABUPATEN SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KPR
SUBSIDI DI BTN SYARIAH PAREPARE.**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 April 2020

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair

SRN IP0000200



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 29 Telp (0421) 23504 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : ip@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 200/IP/DPM-PTSP/6/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **INDRA AGUS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT : **DUSUN POLEWALI, KEC. PANCA LAUTANG, KAB. SIDRAP**

LINTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KPR SUBSIDI DI BTN SYARIAH PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK BTN SYARIAH KOTA PAREPARE**

WAKTU PENELITIAN : **02 Juni 2020 s.d. 02 Juli 2020**

ii. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 iii. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 03 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP : 19620915 198101 2 001

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen aslinya (jika ada) harus dikumpulkan Serdikas Elektronik yang diterbitkan BSE
- Dokumen aslinya dapat dibuktikan keasliannya dengan tanda di- digitalisasi (DPM) atau Paspor (jika QR Code)



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

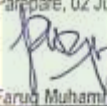
Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Manager BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Indra Agus
NIM : 15.2300.165
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PERMBERIAN PERMBIAYAAN KPR SUBSIDI DI BTN SYARIAH PAREPARE**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 02 Juni 2020 s.d tanggal 02 Juli 2020.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 02 Juli 2020


Faruz Muhammad Rifa
Pjs. Sub Branch Manager



PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti:

Nama : RIAN RAFIQ
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : PRIA
Usia : 25 tahun
Jabatan : PENANGGUNG SEBUK

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya juga akan memberi keterangan yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya temukan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Parepare, 19 Juni 2020

Responden


RIAN RAFIQ



PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



PRODUK BTN SYARIAH PAREPARE



DATA DIRI



INDRA AGUS merupakan salah satu Mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Perbankan Syariah yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1996 di Pinrang. Anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari bapak Agus dan ibu Suharni. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Wanio pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun.

Kemudian, masuk di Madrasah Tsanawiyah DDI Wanio pada tahun 2009-2012 dan melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah DDI Wanio dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Perbankan Syariah.

Penulis juga aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan dalam Kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare dan Organisasi OKP yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota Parepare.

Kemudian, penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul skripsi: **Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan KPR Subsidi di BTN Syariah Parepare.**

